

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

Salma Ramadhanti

NPP. 30.0630

Asdaf Kota Serang, Provinsi Banten

Program Studi Keuangan Publik

Email : sramadhanti29@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Decky Dwi Utomo, M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *The author focuses on the low PAD contribution in Serang City. The author realizes that in the implementation of regional government, problems such as low PAD contributions will affect the level of regional financial capacity. **Purposes :** This study aims to determine the level of regional financial capacity in supporting governance in Serang City for 5 fiscal years as seen from the formula for financial ratio analysis and to determine factors that can influence regional financial capacity and also efforts to improve regional financial capacity in Serang City. **Method :** The method used is descriptive qualitative. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion/verification. **Results/Findings :** The results of the study show that regional financial capacity in Serang City in 2017-2021 tends to increase when viewed from the growth of regional income. The City of Serang is stated to still be very dependent on Transfer Income, especially from the General Allocation Fund. The results of the calculation of the Degree of Fiscal Decentralization Ratio (DDF) have an average of 15%, the Regional Financial Dependence Ratio is 80%, the Ratio of Regional Financial Independence in Serang City is 30%, and the Ratio of Lg-R Effectiveness in Serang City has an average of 110%. **Conclusion :** The financial capacity of the Serang City area is still in the low category, which is based on an analysis related to the comparison between the contribution of regional original income and transfer income, which is still very far away, seeing that Serang City's original regional income is much lower than transfer income.*

Keywords : *Regional Financial Capability, Ratio, Regional Revenue, Locally-generated Revenue (Lg-R), Transfer Revenue.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada kontribusi PAD yang rendah di Kota Serang. Penulis menyadari bahwa pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, permasalahan seperti kontribusi PAD yang rendah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang selama 5 tahun anggaran yang dilihat dari rumus analisis rasio keuangan serta mengetahui faktor yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah dan juga upaya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kota Serang. **Metode :** Metode yang digunakan yaitu deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hasil wawancara dari beberapa informan yaitu pejabat dari BPKAD Kota Serang sebagai data primer dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Serang tahun 2017-2021 sebagai data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan

keuangan daerah di Kota Serang pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat jika dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Daerahnya. Kota Serang dinyatakan masih sangat bergantung terhadap Pendapatan Transfer, terutama dari Dana Alokasi Umum. Hasil dari penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memiliki rata-rata sebesar 15%, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 80%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Serang sebesar 30%, serta Rasio Efektivitas PAD Kota Serang memiliki rata-rata sebesar 110%. **Kesimpulan** : Kemampuan keuangan daerah Kota Serang masih termasuk ke dalam kategori rendah, dimana berdasarkan analisis terkait perbandingan antara Kontribusi dari pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih sangat jauh melihat pendapatan asli daerah Kota Serang jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer.

Kata Kunci : Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio, Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia dalam hal ini berada dalam paradigma yang baru, dimana salah satu tujuan yang menjadi fokus dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terciptanya *Good Governance* atau kondisi dimana pemerintahan suatu negara dapat dikatakan baik, dengan melakukan beberapa perubahan yang mendasar dalam hal tata Kelola daerah serta pengoptimalan potensi daerah yang dimiliki.

Salah satu yang menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah. Meskipun dapat diakui bahwa berbagai aspek lain juga memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspek keuangan ini adalah salah satu variable yang digunakan untuk melihat secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pentingnya kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan suatu sumber pendapatan daerah dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memantau perkembangannya serta menggali sektor-sektor yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan agar pendapatan daerah tersebut dapat lebih meningkat.

Besaran jumlah penerimaan PAD menjadi tolak ukur potensi suatu daerah dalam menggali PAD itu sendiri. Tingkat persentase PAD atas penerimaan APBD ternyata mempengaruhi tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Apabila kontribusi PAD semakin besar, maka tingkat ketergantungan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. Kota Serang sebagai salah satu daerah yang menerapkan sistem desentralisasi di Indonesia, secara aktif turut berupaya mewujudkan kemandirian daerah dengan berupaya mengoptimalkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui penerimaan PAD.

Tabel 1.1

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan Daerah (PD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
2017	1.231.344.645.550	232.458.208.409	19%
2018	1.242.437.572.372	164.218.548.654	13%
2019	1.342.262.284.840	190.029.710.255	14%
2020	1.265.514.990.409	180.263.229.327	14%
2021	1.466.972.945.007	206.238.434.813	14%
Rata-Rata	1.309.706.487.636	194.641.626.292	15%

Sumber : Diolah Penulis, 2022. (Berdasarkan LRA Kota Serang 2017-2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah Kota Serang tahun anggaran 2017 – 2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Kontribusi yang diberikan oleh PAD dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021 berada di bawah 20% dengan *range* persentase sebesar 13% - 19%. Jumlah kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase capaian sebesar 19% dan kontribusi terendah terjadi pada satu tahun setelahnya (2018) dimana terjadi penurunan secara drastis sebesar 7% dari capaian sebelumnya. Sehingga dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa PAD Kota Serang memiliki kontribusi yang masih rendah dari total pendapatan daerah jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer yang dapat dilihat dari tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah
Kota Serang Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Pend Transfer Dana Perimbangan	Kontribusi Dana Perimbangan terhadap PD (%)
2017	1.231.344.645.550	877.330.483.239	71%
2018	1.242.437.572.372	735.561.644.568	59%
2019	1.342.262.284.840	777.914.675.879	58%
2020	1.265.514.990.409	722.604.486.576	57%
2021	1.466.972.945.007	947.689.513.653	65%
Rata - Rata	1.309.706.487.636	812.220.160.783	62%

Sumber : Diolah Penulis, 2022. (Berdasarkan LRA Kota Serang 2017-2021)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat dikatakan bahwa Kontribusi Pendapatan Transfer dalam hal ini Dana Perimbangan terhadap Total pendapatan Daerah mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan PAD, maka persentase kontribusi pendapatan transfer jauh lebih besar dengan *range* persentase sebesar 58% - 70% keatas. Melalui ketiga tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kontribusi dari pendapatan transfer mendominasi dari total pendapatan daerah Kota Serang. Persentase kontribusi pendapatan transfer diatas menunjukkan bahwa kontribusi dari pendapatan transfer masih sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah ataupun pendapatan daerah lainnya. Hal tersebut menunjukkan Ketergantungan Kota Serang terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat cenderung tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi dana transfer masih sangat besar dari anggaran dalam 5 (lima) tahun anggaran dari Kota Serang.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, permasalahan seperti kontribusi PAD yang rendah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Jika tidak ditindaklanjuti maka suatu hari Pemerintah Daerah Kota Serang akan dianggap gagal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga diperlukan usaha dalam meningkatkan PAD dengan tujuan akhir meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dilansir dari artikel <https://ppid.serangkota.go.id/> yang dipublikasikan pada tanggal 26 April 2021, dikatakan bahwa Pemerintah Kota Serang masih dalam ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kontribusi kemandirian dalam APBD masih dalam capaian 17% yang sekira masih minim dalam pendapatan. Optimalisasi pendapatan harus ditingkatkan di daerah sendiri termasuk kota serang. Dalam rangka tentu untuk kesehatan masyarakatan untuk belanja daerah. Dengan beberapa regulasi dan deregulasi pemerintah kota serang ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan, agar kota serang mampu mandiri seperti pemerintah kabupaten/kota lainnya di indonesia.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, terutama mengenai rasio yang digunakan dalam penelitian. Penulis mengambil lima penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal ilmiah dan thesis. Kelima penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Amelia Soviana dan Suparno (2021) yang berjudul Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh (Soviana & Suparno, 2021) menemukan bahwa Kemandirian pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh tahun 2014-2019 termasuk fluktuatif setiap tahunnya dengan rata-rata 10,33% termasuk dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif, kemudian Kecenderungan kemandirian pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh tahun 2014-2019 rata-rata sebesar 95,62% menunjukkan tidak ada pembangunan.

Kedua, penelitian oleh I Putu Dharmanu Yudhartha, I Ketut Winaya dan Wahyu Budi Nugroho (2020) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan dalam Dinamika Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Studi Kasus terhadap APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2014) (Yudhartha et al., 2020) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten Tabanan tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kondisi ini tergambar dari rendahnya penerimaan sektor pendapatan asli daerah sedangkan dalam 3 tahun terakhir ketergantungan terhadap dana alokasi umum masih cukup tinggi. Kemudian

Ketiga, penelitian oleh Jovan Febriantoko yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera (Febriantoko, 2017) menyatakan bahwa Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 35,19133 % dengan perolehan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu 58,24694 % dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 11,75206%.

Keempat, penelitian oleh Deddy Candra, Vince Ratnawati dan Yesi Mutia yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Candra et al., 2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas keuangan lokal antara kabupaten / kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan rasio Indeks Kemampuan Kapabilitas Rutin, dalam penelitian ini. pendapatan PAD di daerah didominasi oleh pendapatan dari sektor pajak dan jika ekstensifikasi, pengendalian kebocoran PAD, dan peningkatan administrasi pajak dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan PAD.

Kelima, penelitian oleh Anjar Nora Vurry, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng (Vurry et al., 2018) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Buleleng termasuk dalam kategori rendah sekali, meskipun rasio efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif, serta rasio efisiensi PAD termasuk dalam kategori sangat efisien. Kemudian trend menunjukkan arah perkembangan yang positif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014- 2016, dan trend efisiensi menunjukkan arah perkembangan negatif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menggunakan empat rumus rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Serang Provinsi Banten. Penulis menggunakan konsep menurut Mahmudi (2019) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu analisis keuangan daerah, namun dari sekian banyak rumus yang ada penulis hanya memilih empat rumus yang sekiranya dapat

menjadi gambaran kemampuan keuangan daerah di Kota Serang. Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

1.5 Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang, serta menjadi bahan untuk memperluas wawasan mengenai kemampuan keuangan suatu daerah serta memahami proses pengukuran kemampuan keuangan daerahnya masing-masing.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2016). Penelitian Kualitatif merupakan metode yang berbekal pada teori yang jelas karena teori tersebut akan berfungsi dalam penjelasan masalah yang akan diteliti, selain itu juga sebagai dasar dan referensi dalam menyusun instrumen penelitian. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat bersifat deskriptif. Sejalan dengan konsep pendekatan Kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2016), tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penulis untuk membahas dan mengolah data statistik yang memuat informasi tentang objek yang diteliti. Hal tersebut diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (berupa angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dll) atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendikripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut (Sudjana, 2009).

Penulis dalam melakukan penelitian ini memperoleh data dari 2 (dua) sumber, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara yang diperoleh sebagai informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016, p. 218). Selain data primer, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Serang tahun yang diambil dalam jangka 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017-2021. Kedua sumber data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap lokus yang dipilih yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Provinsi Banten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan analisa penulis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang dipilih sebelumnya, kemudian hasil wawancara tersebut dibuktikan dengan sumber data sekunder yang diperoleh, yaitu LRA Kota Serang tahun 2017-2021 yang selanjutnya menjadi bahan dalam rumus analisis rasio keuangan yang telah dipilih. Rumus tersebut terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Efektivitas PAD. Keempat rasio tersebut secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang memengaruhi

kemampuan keuangan Kota Serang serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang.

Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di Kota Serang Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat jika dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Daerahnya. Meskipun pendapatan daerah Kota Serang terus meningkat, namun apabila dilihat dari perkembangan APBD Kota Serang dan rincian Laporan Realisasi Anggaran selama 5 tahun anggaran yakni tahun 2017-2021, Kota Serang dinyatakan masih sangat bergantung terhadap Pendapatan Transfer, terutama dari Dana Alokasi Umum. Selain itu, hasil penerimaan PAD yang didapatkan hanya mampu membiayai belanja pegawai. Adanya pernyataan dari informan menjadi bukti bahwa memang penerimaan PAD Kota Serang masih termasuk rendah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang, permasalahan kontribusi PAD yang rendah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Serang (baik menjadi rendah ataupun tinggi). Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan data sekunder yang telah diolah oleh penulis sebagaimana yang dibutuhkan dalam menghitung beberapa rasio keuangan.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2017-2021

Thn	Pendapatan Daerah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi		
2017	1.236.183.336.736	1.231.344.645.550	(4.838.691.186)	99,61
2018	1.245.227.218.500	1.242.437.572.372	2.789.646.128	99,78
2019	1.331.495.033.986	1.342.262.284.840	10.767.250.854	100,81
2020	1.277.357.350.541	1.265.514.990.409	(11.842.360.132)	99,07
2021	1.448.344.033.088	1.466.972.945.007	18.628.911.919	99,49

Sumber : Data diolah penulis, 2023 (Berdasarkan LRA Kota Serang tahun 2017 - 2021)

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017-2021

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	214.818.694.729	232.458.208.409	108,21	17.639.513.680
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	<i>102.537.500.000</i>	<i>117.703.375.555</i>	<i>114,79</i>	<i>15.165.875.555</i>
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	<i>10.699.415.620</i>	<i>8.561.723.485</i>	<i>80,02</i>	<i>(2.137.692.135)</i>
<i>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</i>	<i>101.581.779.109</i>	<i>106.193.109.369</i>	<i>104,54</i>	<i>4.611.330.260</i>
2018				

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	151.589.133.197	164.218.548.654	108,33	(12.629.415.457)
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	<i>119.183.000.000</i>	<i>128.677.842.933</i>	<i>107,97</i>	<i>(9.494.842.933)</i>
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	<i>12.869.636.800</i>	<i>8.560.072.708</i>	<i>66,51</i>	<i>(4.309.564.092)</i>
<i>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</i>	<i>19.536.496.397</i>	<i>26.980.633.013</i>	<i>138,10</i>	<i>7.444.136.616</i>
2019				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	178.224.903.079	190.029.710.255	106,62	11.804.807.176
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	<i>134.530.000.000</i>	<i>143.984.654.737</i>	<i>107,03</i>	<i>9.454.654.737</i>
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	<i>14.000.000.000</i>	<i>13.545.505.333</i>	<i>96,75</i>	<i>(454.494.667)</i>
<i>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</i>	<i>29.694.903.079</i>	<i>32.499.550.185</i>	<i>109,44</i>	<i>2.804.647.106</i>
2020				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	166.140.732.845	180.263.229.327	108,50	14.122.496.482
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	<i>125.403.000.000</i>	<i>139.176.728.788</i>	<i>110,98</i>	<i>13.773.728.788</i>
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	<i>13.453.500.000</i>	<i>15.346.858.105</i>	<i>114,07</i>	<i>1.893.358.105</i>
<i>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</i>	<i>27.284.232.845</i>	<i>25.739.642.434</i>	<i>94,34</i>	<i>(1.544.590.411)</i>
2021				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	216.342.213.497	206.238.434.813	83,32	(10.103.778.684)
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	<i>143.125.000.000</i>	<i>144.762.759.403</i>	<i>97,24</i>	<i>1.637.759.403</i>
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	<i>36.099.200.000</i>	<i>26.241.619.743</i>	<i>42,51</i>	<i>(9.857.580.257)</i>
<i>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</i>	<i>37.118.013.497</i>	<i>35.234.055.667</i>	<i>69,35</i>	<i>(1.883.957.830)</i>

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023 (Berdasarkan LRA Kota Serang tahun 2017-2021)

Tabel 3.3
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang
Tahun Anggaran 2017-2021

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017				
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.021.364.642.007	998.886.437.141	97,80	(22.478.204.866)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	902.950.898.151	877.330.483.239	97,16	(25.620.414.912)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	118.413.743.856	121.555.953.902	102,65	3.142.210.046
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	-	0,00
2018				
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.018.153.285.303,	1.003.053.326.709	98,52	(15.099.958.594)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	745.243.100.000	735.561.644.568	98,70	(9.681.455.432)
Bagi Hasil Pajak - LRA	77.647.343.000	70.738.966.362	91,10	(6.908.376.638)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.922.079.000	1.593.297.207	82,89	(328.781.793)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	636.602.678.000	636.602.678.000	100,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	29.071.000.000	26.626.702.999	91,59	(2.444.297.001)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	123.385.005.000	120.347.699.473	97,54	(3.037.305.527)
<i>Dana Penyesuaian</i>	123.385.005.000	120.347.699.473	97,54	(3.037.305.527)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	119.525.180.303	123.143.982.668	103,03	3.618.802.365
<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LRA</i>	119.525.180.303	123.143.982.668	103,03	3.618.802.365
Bantuan Keuangan - LRA	30.000.000.000	24.000.000.000	80,00	(6.000.000.000)

<i>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA</i>	30.000.000.000	24.000.000.000	80,00	(6.000.000.000)
2019				
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.077.096.930.907	1.076.217.329.133	99,92	(879.601.774)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	795.373.476.000	777.914.675.879	97,80	(17.458.800.121)
Bagi Hasil Pajak - LRA	76.965.138.000	61.187.534.150	79,50	(15.777.603.850)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.114.103.000	1.959.515.442	92,69	(154.587.558)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	674.620.421.000	674.620.421.000	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	41.673.814.000	40.147.205.287	96,34	(1.526.608.713)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	125.294.232.000	116.340.267.867	92,85	(8.953.964.133)
<i>Dana Penyesuaian</i>	125.294.232.000	116.340.267.867	92,85	(8.953.964.133)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	116.429.222.907	141.962.385.387	121,93	25.533.162.480
<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LRA</i>	116.429.222.907	141.962.385.387	121,93	25.533.162.480
Bantuan Keuangan - LRA	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00	0,00
<i>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA</i>	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00	0,00
2020				
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.023.482.627.696	1.000.271.957.082	97,73	(23.210.670.614)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	738.909.501.220	722.604.486.576	97,79	(16.305.014.644)
Bagi Hasil Pajak - LRA	85.497.856.450	76.202.411.151	89,13	(9.295.445.299)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	3.150.145.770	1.592.030.901	50,54	(1.558.114.869)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	618.641.127.000	613.720.963.000	99,20	(4.920.164.000)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	31.620.372.000	31.089.081.524	98,32	531.290.476
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	154.752.664.984	157.124.396.092	101,53	2.371.731.108
<i>Dana Penyesuaian</i>	154.752.664.984	157.124.396.092	101,53	2.371.731.108
Pendapatan Transfe Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	84.820.461.492	75.543.074.414	89,06	(9.277.387.078)
<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LRA</i>	84.820.461.492	75.543.074.414	89,06	(9.277.387.078)
Bantuan Keuangan - LRA	45.000.000.000	45.000.000.000	100,00	0,00
<i>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA</i>	45.000.000.000	45.000.000.000	100,00	0,00
2021				
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.149.626.465.020	1.177.556.554.294	102,43	27.930.089.274
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	913.646.283.633	947.689.513.653	103,73	34.043.230.020
Bagi Hasil Pajak - LRA	62.923.782.000	100.227.052.412	159,28	37.303.270.412
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.685.848.000	3.360.586.617	199,34	1.674.738.617
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	604.815.966.000	604.815.966.000	100,00	0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	244.220.687.633	239.285.908.624	97,98	(4.934.779.009)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	7.803.305.000	7.803.305.000	100,00	0,00
<i>Dana Penyesuaian</i>	7.803.305.000	7.803.305.000	100,00	0,00
Pendapatan TransfePemerintah Daerah Lainnya - LRA	181.461.520.387	175.348.379.641	96,63	(6.113.140.746)
<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LRA</i>	181.461.520.387	175.348.379.641	96,63	(6.113.140.746)
Bantuan Keuangan - LRA	46.715.356.000	46.715.356.000	100,00	0,00
<i>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA</i>	25.000.000.000	25.000.000.000	100,00	0,00

Sumber : Data diolah penulis, 2023 (Berdasarkan LRA Kota Serang tahun 2017 2021)

Faktor yang menjadi penghambat bagi kemampuan keuangan di Kota Serang yakni terkait dengan potensi daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Seperti aset daerah yang terdiri dari bangunan bersejarah, rumah ibadah yang memang menjadi daya Tarik daerah Kota Serang dan berpengaruh bagi penghasilan daerah. Selanjutnya yang menjadi masalah yaitu terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal. Salah satu penyebab kurang optimalnya pemungutan pajak di Kota Serang yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Selain dari kondisi para wajib pajak, permasalahan lainnya yaitu kurangnya penggunaan sistem pembayaran pajak yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Untuk para wajib pajak yang belum lanjut usia mungkin familiar dengan penggunaan sistem tersebut, namun untuk para Wajib Pajak yang lanjut usia akan cukup kesulitan untuk menggunakannya dan butuh bantuan.

Melihat beberapa masalah tersebut, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang untuk menanggulangi masalah ini yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta membuat inovasi kebijakan terkait pemungutan pajak daerah yang sekiranya menguntungkan daerah sehingga tidak terjadi defisit anggaran.

3.2 Pembahasan Penelitian

Hasil diatas dibuktikan dengan melakukan penghitungan rasio keuangan berdasarkan sumber data yang ada. Berdasarkan Analisa beberapa rasio tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

3.2.1 Derajat Desentraliasi Fiskal (DDF)

Rasio DDF ini digunakan untuk memberikan gambaran seberapa besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Rasio DDF terdiri dari dua komponen, yakni PAD dan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kota Serang. Berikut hasil perhitungan dari Rasio DDF Kota Serang.

$$DDF\ 2017 = \frac{232.458.208.409}{1.231.344.645.550} \times 100\% = 18,87\%$$

$$DDF\ 2018 = \frac{164.218.586.549}{1.242.437.572.372} \times 100\% = 13,21\%$$

$$DDF\ 2019 = \frac{190.029.710.255}{1.342.262.284.840} \times 100\% = 14,15\%$$

$$DDF\ 2020 = \frac{180.263.229.327}{1.265.514.990.409} \times 100\% = 14,24\%$$

$$DDF\ 2021 = \frac{206.238.434.813}{1.466.972.945.007} \times 100\% = 14,05\%$$

Jika diurutkan sesuai dengan kriteria penilaian Derajat Desentralisasi, Kota Serang berada di kategori kurang dengan skala interval 10,01-20,00. Hal ini membuktikan bahwa Kondisi Keuangan Daerah Kota Serang masih belum cukup mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut merupakan hasilnya :

Tabel 3.4
Hasil Perhitungan Rasio DDF (Diurutkan Sesuai Kategori)

Tahun	DDF (%)	Kategori
2017	18,87%	Kurang
2018	13,21%	Kurang
2019	14,15%	Kurang
2020	14,24%	Kurang
2021	14,05%	Kurang

Sumber : Data diolah Penulis (Berdasarkan LRA Kota Serang Tahun 2017-2021)

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan rasio di atas, rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kota Serang yang termasuk dalam kategori *kurang* disebabkan oleh Kontribusi PAD yang tergolong kecil. Walaupun terlihat stabil, tidak dapat dipungkiri bahwa PAD Kota Serang memang tidak cukup besar dan peruntukkan PAD Kota Serang hanya cukup untuk membiayai belanja pegawai. Sehingga dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah Kota Serang masih kurang dalam penerimaan PAD guna membiayai keperluan atau program daerah.

3.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini terdiri dari dua komponen, yakni Pendapatan Transfer dan Total Pendapatan Daerah. Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ketergantungan Keuda} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui bahwa semakin tinggi hasil persentase rasio, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap Pendapatan Transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun provinsi. Jika semakin rendah, akan terjadi sebaliknya. Berikut hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Serang tahun 2017-2021 :

$$\text{KTKD 2017} = \frac{998.886.437.141}{1.231.344.645.550} \times 100\% = 81,12\%$$

$$\text{KTKD 2018} = \frac{1.003.053.326.709}{1.242.437.572.372} \times 100\% = 80,73\%$$

$$\text{KTKD 2019} = \frac{1.076.217.329.133}{1.342.262.284.840} \times 100\% = 80,17\%$$

$$\text{KTKD 2020} = \frac{1.000.271.957.082}{1.265.514.990.409} \times 100\% = 79,04\%$$

$$\text{KTKD 2021} = \frac{1.177.556.554.294}{1.466.972.945.007} \times 100\% = 80,27\%$$

Jika diurutkan sesuai dengan kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah, Kota Serang berada di kategori Sangat Tinggi dengan skala interval >50,00. Hal ini membuktikan bahwa Penerimaan Pendapatan Kota Serang didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini merupakan masalah bagi daerah Kota Serang dimana dapat dikatakan Kota Serang masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Berikut merupakan hasilnya :

Tabel 3.5
Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
(Diurutkan Sesuai Kategori)

Tahun	KTKD (%)	Kategori
2017	81,12%	Sangat Tinggi
2018	80,73%	Sangat Tinggi
2019	80,17%	Sangat Tinggi
2020	79,04%	Sangat Tinggi
2021	80,27%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah Penulis (Berdasarkan LRA Kota Serang Tahun 2017-2021)

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan rasio di atas, diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Serang yang sangat tinggi ini disebabkan oleh kurangnya kontribusi PAD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang. Hal tersebut terbukti dari pernyataan inti yang diberikan oleh Kepala BPKAD Kota Serang bahwa ketergantungan keuangan daerah di Kota Serang memang sangat tinggi. Kota Serang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan Pemerintah Pusat. Kota Serang memiliki DAU yang cukup tinggi. Meskipun terjadi penurunan penggunaan pendapatan transfer, Kota Serang masih tetap membutuhkan sebagian pendapatan transfer guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

3.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara Kontribusi PAD dengan sumber pendapatan lainnya, yakni bantuan pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio ini dalam bentuk persentase dan dapat diukur sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Serang tahun 2017-2021 :

$$\text{KMKD 2017} = \frac{232.458.208.409}{877.330.483.239 + 0 + 0} \times 100\% = 58,33\%$$

$$\text{KMKD 2018} = \frac{164.218.586.549}{735.561.644.568 + 24.000.000.000 + 0} \times 100\% = 21,62\%$$

$$\text{KMKD 2019} = \frac{190.029.710.255}{777.914.675.879 + 40.000.000.000 + 0} \times 100\% = 23,23\%$$

$$\text{KMKD 2020} = \frac{180.263.229.327}{722.604.486.576 + 45.000.000.000 + 0} \times 100\% = 23,48\%$$

$$KMKD\ 2021 = \frac{206.238.434.813}{947.689.513.653+25.000.000.000+0} \times 100\% = 21,20\%$$

Jika diurutkan sesuai dengan kriteria kemandirian keuangan daerah, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah Kota Serang berada dalam kategori *rendah sekali* dengan pola hubungan *instruktif* dengan skala interval 0-25. Walaupun pada tahun 2017 kondisi kemandirian keuangan daerah Kota Serang masih dalam kategori *sedang* dengan pola hubungan *partisipatif*, namun jika dirata-ratakan hasilnya akan tetap dalam kategori *rendah sekali*. Berikut merupakan hasilnya :

Tabel 3.6
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(Diurutkan Sesuai Kategori)

Tahun	KMKD (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2017	58,33%	Sedang	Partisipatif
2018	21,62%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	23,23%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	23,48%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	21,20%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data diolah Penulis (Berdasarkan LRA Kota Serang Tahun 2017-2021)

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan rasio di atas, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Serang berada dalam kategori sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan instruktif ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang, pemerintah pusat masih mendominasi. Dapat diartikan bahwa pernyataan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Serang yang sangat rendah sudah terbukti benar, dan dapat dilihat juga dari kontribusi PAD nya yang masih sangat minim sehingga perlunya support dari pendapatan lainnya, khususnya pendapatan transfer.

3.2.4 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah suatu daerah dengan melihat perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, diketahui bahwa jika target penerimaan PAD lebih besar dari realisasi penerimaan PAD, maka hasil persentasenya akan lebih kecil. Semakin besar hasil persentase dari perhitungan rasio ini, maka semakin efektif pula suatu daerah dalam mengelola PAD nya. Maksud dari efektif itu sendiri berarti daerah tersebut mampu mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Serang pada tahun anggaran 2017-2021:

$$\text{Efektivitas PAD 2017} = \frac{232.458.208.409}{133.721.108.000} \times 100\% = 173,83\%$$

$$\text{Efektivitas PAD 2018} = \frac{164.218.586.549}{227.957.908.000} \times 100\% = 72,03\%$$

$$\text{Efektivitas PAD 2019} = \frac{190.029.710.255}{172.138.881.051} \times 100\% = 110,39\%$$

$$\text{Efektivitas PAD 2020} = \frac{180.263.229.327}{200.811.921.840} \times 100\% = 89,76\%$$

$$\text{Efektivitas PAD 2021} = \frac{206.238.434.813}{196.251.281.900} \times 100\% = 105,08\%$$

Jika diurutkan sesuai dengan kategori penilaian efektivitas PAD, maka hasil perhitungan rasio efektivitas PAD mulai dari tahun 2017-2021, tingkat efektivitas PAD di Kota Serang tergolong sangat efektif meskipun pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan menjadi tidak efektif. Berikut merupakan hasilnya :

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD (Diurutkan Sesuai Kategori)

Tahun	KTKD (%)	Kategori
2017	173,83 %	Sangat Efektif
2018	72,03 %	Tidak Efektif
2019	110,39 %	Sangat Efektif
2020	89,76 %	Cukup Efektif
2021	105,08 %	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah Penulis (Berdasarkan APBD dan LRA Kota Serang Tahun 2017-2021)

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan rasio di atas, diketahui bahwa tingkat efektivitas PAD cenderung membaik dikarenakan Kota Serang terus mengupayakan untuk memperbaiki manajemen pengeioloan keuangannya. Meskipun pendapatan asli daerah Kota Serang sedikit, namun Kota Serang masih mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat terus mencapai target yang ditetapkan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kepala BPKAD Kota Serang, Drs. H. Imam Rana Hardiana, M.Si. menyampaikan bahwa Kota Serang saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah merupakan suatu tindakan atau usaha dalam memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yakni : (a) Aspek Kelembagaan, (b) Aspek ketatalaksanaan dan (c) Aspek Personalia.

Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya tersebut khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sebagai bentuk upaya dalam mengurangi ketergantungan keuangan terhadap dana transfer, bu Ina Linawati., S.E., A.K., M.M., selaku Sekretaris BPKAD Kota Serang menyampaikan bahwa sempat membuat kesepakatan terkait pengurangan kegiatan pemerintahan di luar kota, dan sempat diberlakukan Ketika adanya pandemic covid-19 dimana situasi tersebut bersifat darurat. Acuan dari kebijakan ini terdapat dalam surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2814/SJ yang melarang ASN Kementerian Dalam Negeri untuk berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik serta cuti dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Adanya peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya silang pendapat dari berbagai pihak seperti pihak perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Melihat dari surat edaran tersebut, Kota Serang kemudian mendapatkan ide untuk membuat inovasi kebijakan yang diharapkan dapat menekan jumlah belanja daerah dan menambah pendapatan asli daerah. Untuk saat ini, pelaksanaan peraturan tersebut sudah mulai diterapkan oleh pemerintah daerah kota serang namun belum ditetapkan secara resmi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa penulis mengenai kemampuan keuangan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang Provinsi Banten, dengan melihat kondisi keuangan pendapatan Kota Serang tahun 2017-2021 melalui LRA serta diukur berdasarkan beberapa rasio, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Serang masih termasuk ke dalam kategori rendah, dimana berdasarkan analisis terkait perbandingan antara Kontribusi dari pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih sangat jauh melihat pendapatan asli daerah Kota Serang jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer.

- a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memiliki rata-rata sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Serang masih sangat kurang dalam hal membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, Kota Serang masih belum mandiri.
- b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki rata-rata sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Serang masih bergantung kepada pendapatan transfer. Dapat dibuktikan dengan jumlah pendapatan transfer yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.
- c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Serang memiliki rata-rata sebesar 30%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Serang masih dalam kategori rendah dimana memiliki pola hubungan Konsultatif, dimana dalam pola konsultatif ini pemerintah lebih banyak memberikan konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena daerah tersebut sudah mulai lebih mampu melaksanakan desentralisasi.
- d) Rasio Efektivitas PAD Kota Serang memiliki rata-rata sebesar 110%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Serang sudah termasuk ke dalam kategori sangat efektif dalam mengelola PAD.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu waktu yang dimiliki oleh informan selama melakukan wawancara. Selain itu, penulis terkendala lokasi penelitian yang termasuk tidak dalam pusat kota serta biaya dalam melakukan penelitian. Penelitian hanya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) : Penulis menyadari bahwa hasil temuan penelitian ini masih termasuk analisa awal. Penulis menyarankan untuk adanya penelitian

lanjutan mengenai kemampuan keuangan daerah di Kota Serang karena masih belum banyak peneliti yang membahas mengenai masalah ini. Kota Serang masih termasuk kota yang baru dibangun, untuk itu perlu penelitian selanjutnya yang diharapkan menjadi titik awal atau acuan bagi Kota Serang dalam melakukan perubahan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan serta staff dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman baru bagi penulis selama melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan memberi dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. In *Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146–159.
- Febriantoko, J. (2017). Analisis kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di pulau sumatera. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis Dan Desain*, 56–62.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sudjana, N. (2009). *Metode Statistik*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Soviana, A., & Suparno. (2021). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 242–249. <http://www.ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/1371>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Yudarta, I. P. D., Winaya, I. K., & Nugroho, W. B. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan dalam Dinamika Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Studi Kasus terhadap APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2014). *Simdos.Unud.Ac.Id*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/2c9906abeaf3dcf50ee9cd3149ec2960.pdf